

Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir

Social Attitude and Community Participation on Flood Prevention Natural Disaster

Sri Yuni Murti Widayanti

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. E- mail: yunimurti@rocketmail.com.
HP 085747435299. Diterima 31 Maret, diperbaiki 25 april, disetujui 16 Mei 2016.

Abstract

The research on social attitude and community participation on the floods prevention aimed to describe community's knowledge. Social attitude, and participation toward floods victims prevention and also the implementation of post-floods social rehabilitation. The research was conducted in the district of North Lampung, Lampung Province. Data were collected from various sources, such as documentation , in-depth interview, and observation. Through descriptive qualitative analysis, the results revealed that community's knowledge and understanding about floods were quite high, so the floods prevention which was conducted by the social agencies and related social institutions were more effective in reducing the impact of floods. People tried to find social rehabilitation assistance for the flood victims. The proposed recommendation was there should be mitigation efforts towards floods prevention through regional regulation which regulates spacial building, implementation and enforcement of legislation on safety land use, as well as the development of the village disaster alert program that will be used to coordinating participation of community, improving the system of agriculture and socialization to the society about the causes and effects of floods,

Keywords: *social attitude; community's participation; floods prevention.*

Abstrak

Penelitian tentang sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir di Provinsi Lampung bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan dampak terjadinya bencana banjir, serta diketahuinya sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir. Lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana alam banjir sudah tinggi, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh petugas instansi sosial atau yang terkait, lebih efektif mengurangi dampak akibat bencana alam banjir. Masyarakat berusaha mencari bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana banjir, rekomendasi yang diusulkan adalah perlu kiranya upaya mitigasi terhadap bencana dengan melakukan pencegahan terhadap bencana banjir dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penggunaan tata ruang bangunan. Penerapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan, penggunaan tanah dan pengembangan program kampung siaga bencana sebagai wadah partisipasi masyarakat. Memperbaiki sistem pertanian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang faktor penyebab dan akibat banjir.

Kata kunci: *sikap sosial; partisipasi masyarakat; penanggulangan banjir*

A. Pendahuluan

Bencana banjir selalu membawa kerugian, baik materiil maupun moril, bahkan tidak jarang membawa korban jiwa. Secara geografis kondisi sebagian wilayah di Indonesia kedudukannya dilintasi garis khatulistiwa. Posisi ini memiliki implikasi besar dan berpengaruh terhadap cuaca,

iklim, dan musim. Pengertian umum cuaca, iklim, dan musim perlu dipahami oleh masyarakat luas karena bencana banjir tidak lepas dari kondisi cuaca, iklim, dan musim yang terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Di samping itu kerusakan dan beralih fungsinya hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Hutan Indonesia berkurang secara drastis, dalam kurun waktu 2009-2013, Indonesia kehilangan hutan seluas 4,6 juta hektar atau seluas Provinsi Sumatra Barat, tujuh kali luas Provinsi DKI Jakarta. *Forest Watch Indonesia* (FWI) mengungkapkan fakta mencekam tersebut dalam buku *Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2009-2013*, yang diluncurkan pada Kamis 11 Desember 2014 di Jakarta. EG Togu Manurung, ketua Perkumpulan FWI mengungkapkan, bahwa dalam kurun waktu tersebut kecepatan hilangnya hutan mengejutkan. "Setiap menit, hutan seluas tiga lapangan bola hilang," katanya. Hutan yang tersisa kini 82 juta hektar, masing-masing 19,4 Juta hektar di Papua, 26,6 juta hektar di Kalimantan, 11,4 juta hektar di Sumatera, 8,9 juta hektar di Sulawesi, 4,3 juta hektar di Maluku, serta 1,1 juta hektar di Bali dan Nusa Tenggara. apabila praktek tata kelola lahan hutan tidak berubah dan pembukaan hutan terus dibiarkan, jumlah hutan akan terus menyusut. Untuk mempertahankan hutan di Indonesia Cristian menuturkan, yang diperlukan adalah perbaikan tata kelola, izin kehutanan, dan pengawasan, juga leadership dari pemerintah. Senada dengan Cristian, ahli kehutanan Insitut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodiharjo, juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola. Undang-undang serta sejumlah rencana dari moratorium hingga program REDD sudah cukup baik. Namun masalahnya pada tata kelola di lapangan.

Semakin luasnya lahan kritis akibat pembakaran hutan secara besar-besaran, perladangan berpindah, atau pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat lahan seperti ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau, dampaknya adalah terjadinya bencana banjir dan kebakaran hutan. Banjir bandang dapat terjadi sebagai akibat dari *illegal logging* karena menipisnya hutan yang biasanya mampu menyimpan dan menyerap air pada saat musim hujan. Faktor penyebab banjir lainnya adalah ditutupnya daerah resapan air, yang seharusnya mampu menampung debit air hujan dialihfungsikan menjadi permukiman war-

ga, serta terjadinya perubahan iklim. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan bencana banjir.

Banjir disebabkan meluapnya air sungai, kemudian merendam serta menggenangi daerah sekitarnya. Bencana banjir besar apabila daerah genangannya luas dan airnya tinggi, terjadi pada waktu cukup lama, berjam-jam bahkan dapat sehari-hari. Banjir di Indonesia pada umumnya terjadi sekali dalam setahun, tetapi adakalanya beberapa tahun sekali, dan biasanya terjadi pada musim penghujan. Banjir terjadi pada daerah yang berdekatan dengan sungai, jarang terjadi di bagian hulu sungai. Bagian hulu sungai biasanya sempit, aliran air di bagian hulu sangat cepat, sehingga tidak sampai menggenang. Bagian tengah lebih rendah daripada hulu, di bagian tengah banjir lebih sering terjadi. Bagian hilir berdekatan dengan muara, banjir paling sering terjadi, karena aliran di bagian tengah dan hilir menjadi lebih lambat daripada di hulu (Gifford Clive, 2009: 14)

Setiap bencana banjir datang di wilayah manapun selalu membawa kerugian dan korban. Dari tahun ke tahun jumlah kerugian cenderung terus meningkat, berdampak pada makin tingginya angka kemiskinan di lokasi bencana. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dari tahun 2002 sampai dengan 2007, korban banjir di Provinsi Lampung tercatat keluarga dalam kategori rumah tangga sangat miskin 46.958 Jiwa (22,36 persen) dari 210.026 jiwa rumah tangga sangat miskin, selanjutnya untuk kategori rumah tangga miskin 72.439 jiwa (21,36 persen) dari 339.100 jiwa warga rumah tangga miskin.

Kondisi tersebut menuntut pihak berwenang dan masyarakat luas untuk tanggap dan peduli (memiliki sikap sosial) berpartisipasi mengupayakan secara cepat dan tepat penanggulangan korban banjir. Kepedulian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, terhadap korban banjir perlu terus ditingkatkan. Pihak berwenang dalam hal ini pemerintah perlu terus mendorong potensi sosial dan ekonomi masyarakat, agar masing-masing warga memiliki sikap sosial positif bagi masyarakat yang

sedang menerima musibah banjir. Bencana alam menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian pada kehidupan manusia, baik dari segi moril maupun materiil serta sosial, yang melampaui batas kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mengatasi dengan sumberdaya pada diri korban.

Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia setiap musim hujan berpotensi banjir, sementara model penanggulangan korban banjir setiap kali diaplikasikan di lapangan mengalami berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia maupun segi teknis lainnya, seperti sulitnya transportasi masuk ke wilayah banjir, tempat pengungsian korban banjir, sehingga evakuasi korban tidak bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengetahuan potensi korban tentang bencana banjir, sebab dan akibat, reaksi dan aksi sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam banjir, bagaimana sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menginventarisasi penanggulangan korban bencana banjir, dalam hal pengetahuan masyarakat, sebab dan akibatnya, cara penanggulangan, sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir di lokasi penelitian.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Model pendekatan dalam penelitian ini adalah *eksploratif*. Lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Utara. Penentuan responden dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive*, baik warga yang menjadi korban banjir maupun warga yang tidak menjadi korban banjir, karena mereka memiliki perhatian dan kepedulian yang sama. Jumlah responden dalam penelitian 50 orang, dengan karakteristik sebagai berikut. Warga masyarakat yang menjadi korban bencana banjir 30 responden dan masyarakat bukan korban banjir yang tinggal di wilayah banjir 20 responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara,

telaah dokumen yaitu mengumpulkan catatan-catatan dari dokumentasi tentang jumlah korban banjir (jiwa, harta benda, dan fasilitas umum), serta observasi terhadap partisipasi masyarakat, 50 warga, baik korban (30 orang) maupun bukan korban (20 orang). Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data, selanjutnya difokuskan pada jawaban permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan memberi makna atau interpretasi terhadap temuan penelitian, analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif (Moleong, 2002).

C. Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Korban Banjir

1. Deskripsi Lampung Utara

Secara geografis Kabupaten Lampung Utara memiliki luas wilayah seluas 2.756,83 km², sedangkan jumlah penduduknya 828.782 jiwa, kepadatan penduduk 191 jiwa, merupakan daerah yang penduduknya jarang. Daerah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi utama pada periode tahun 1995-2000. Pendapatan asli Kabupaten Lampung Utara adalah perkebunan dan tanaman pangan. Komoditas perkebunan unggulan adalah kopi, rasa kopi Lampung sangat terkenal bagi penikmat kopi di dunia. Provinsi Lampung dinobatkan sebagai produsen kopi terbesar nasional karena menyumbang 50 persen dari seluruh produksi nasional. Produksi kopi dihasilkan dari areal seluas 14.050 hektar, terbatas pada jenis kopi Robusta, karena secara topografi Lampung utara sebagian besar (93 persen) adalah dataran rendah maka tidak cocok untuk kopi jenis arabika.

Budidaya kopi di Kabupaten Lampung Utara masih bersifat tradisional, sehingga sangat berpengaruh pada rendahnya produktivitas tanaman, yaitu hanya 500 kg per hektar. Jumlah tersebut seharusnya dapat meningkat apabila pengelolanya lebih baik. Selain kopi di daerah Lampung Utara terdapat komoditas perkebunan lada hitam, tanaman lada merupakan harta karun bagi petani di Kabupaten Lampung Utara. Tataniaga lada menganut sistem pasar bebas, petani menjual lada ke pedagang pengumpul di tingkat kabu-

paten, diteruskan ke tingkat provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara berusaha memberi pembinaan pada petani, agar memanen lada sesuai dengan masa tanam (tepat waktu) sehingga mampu mendapatkan lada dengan kualitas yang lebih baik. Pemerintah daerah juga berusaha membangun kebun induk lada yang difungsikan sebagai penyuplai bibit lada yang baik, bebas hama dan penyakit. Keunggulan sektor pertanian secara tidak langsung di tunjang oleh hidrologi Lampung Utara yang dianugerahi sungai yang mengalir dari arah barat ke timur. Arah barat merupakan wilayah berbukit-bukit sedangkan arah timur adalah tanah landai.

Ciri-ciri khusus daerah Lampung adalah terdapatnya bukit-bukit sempit, kemiringannya antara 8 persen sampai 15 persen dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran aluvial, vegetasi terdapat tanaman-tanaman perkebunan, seperti kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian perladangan, seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran.

Masyarakat Lampung dalam bentuk yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri, berbeda antarkelompok, menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung. Secara umum masyarakat adat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, masyarakat adat Peminggir yang berkediaman di sepanjang pesisir termasuk adat Krui, Ranau Komeri, sampai Kayu Agung, dan masyarakat adat Pepadun yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari masyarakat adat Abung (Abung Siwo Migo), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala atau Tulang Bawang (Migo Pak) dan Buai Lima.

Dalam banyak hal suatu ciri yang disebut dengan genealogis sangat dominan pada masyarakat Lampung, suatu ikatan masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya berdasarkan atas suatu pertalian keturunan, baik karena ikatan maupun hubungan darah. Prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian masyarakat Lampung, yang dapat di simpulkan dalam prinsip, *Pi'il Pesengiri*, diar-

tikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi dan kelompok yang senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu, seorang Lampung dapat mempertaruhkan apa saja, termasuk nyawanya demi untuk mempertahankan *Pi'il Persengirinya*, dengan *Pi'il Pesengiri* seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kendati hal itu merugikan dirinya secara materi.

Sakai Sambayan meliputi beberapa pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu-membahu, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain, tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran. *Nemui Nyimah*, berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja pihak yang berhubungan dengan mereka. Bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada kepada pihak lain, juga bermurah hati dalam bertutur kata serta sopan santun dan ramah tamah terhadap tamu. *Nengah Nyappur*, tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas. Ikut berpartisipasi terhadap hal yang bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Permasalahan sosial yang menonjol di Kabupaten Lampung Utara adalah kemiskinan, yang selalu melekat pada penduduk di Kabupaten Lampung utara. Apabila ditinjau dari banyaknya korban banjir di Kabupaten Lampung Utara, menurut angka dari Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial pada tahun 2006, tercatat korban banjir untuk rumah tangga sangat miskin 3.173 jiwa, selanjutnya rumah tangga miskin 4.741 jiwa. Dari data tersebut diindikasikan, bahwa seringkali Kabupaten Lampung Utara terjadi bencana banjir, karena kemiskinan di daerah tersebut (Pusdatin Kesos, 2007: 103).

2. Gambaran Umum Responden

Tingkat Pendidikan sebagian besar responden korban bencana 16 orang (53,34 persen) berpendidikan tamat sekolah dasar (SD), sembilan orang (30 persen) berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama (SMP), empat orang (13,33 persen) setingkat sekolah menengah atas (SMA), kemudian satu orang (3,33 persen) berpendidikan sarjana (S1), mereka adalah tokoh masyarakat setempat. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana untuk memperoleh penghidupan layak, tetapi responden korban banjir sebagian besar hanya mampu menamatkan pendidikan SD. Dalam pendalaman lebih lanjut melalui wawancara, ternyata rendahnya pendidikan mereka berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin ketika mereka masih berusia sekolah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Chambers (dalam Korin Bastaman, 2000) yang menyatakan, bahwa pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh lima ketidakberuntungan pada kelompok keluarga miskin: keterbatasan kepemilikan aset (*poor*); kondisi fisik lemah; keterisolasian; kerentanan; dan ketidakberdayaan. Menurut Sumodiningrat (2000:24) kemiskinan ditandai dengan: Pertama, jumlah rata-rata anggota keluarga rumah tangga miskin cenderung lebih besar dibanding keluarga tidak miskin; Kedua, rumah tangga miskin menanggung beban sosial ekonomi lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin; Ketiga, beban rumah tangga miskin di daerah perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih besar daripada rumah tangga miskin di perkotaan; Keempat, tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin rendah; Kelima, penghasilan utama rumah tangga miskin di perdesaan bersumber pada kegiatan sektor pertanian.

Apabila ditinjau dari jenis kelamin, responden laki-laki 72,5 persen, perempuan 27,5 persen. Selanjutnya ditinjau dari mata pencaharian responden cukup bervariasi, pekerjaan sebagai petani menempati urutan teratas yaitu 24 orang atau 80 persen, dan 4 orang 13,33 persen adalah pedagang, selanjutnya dua orang 6,67 persen adalah PNS/TNI/Polri. Status mereka 90 persen

sudah menikah dan sebagian besar responden masih berusia produktif, sehingga masih bersemangat untuk bekerja dan memiliki motivasi untuk hidup lebih baik.

Responden bukan korban, sebagian besar yakni 8 orang 40 persen, berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama (SMP), berpendidikan tamat sekolah dasar (SD) enam orang (30 persen), berpendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) empat orang (20 persen), kemudian dua orang (10 persen) berpendidikan sarjana (S1). Apabila ditinjau dari jenis kelamin, responden laki-laki 80 persen dan perempuan 20 persen. Status mereka 14 orang (70 persen) sudah menikah, dan keseluruhan responden dalam usia produktif. Dilihat dari mata pencaharian bukan korban banjir 13 orang (65 persen) sebagai petani, pedagang empat orang (20 persen), dan tiga orang (15 persen) sebagai PNS/TNI/Polri. Dari mata pencaharian responden sebagian besar sebagai petani, setelah dilakukan wawancara lebih lanjut terungkap bahwa sebagian besar mata pencaharian responden sebagai petani merupakan warisan dari orangtua mereka secara turun temurun.

3. Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

Banjir merupakan bentuk bahaya alam yang sangat meresahkan dan mengancam ketenteraman masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Penyebab terjadinya banjir amat penting dalam upaya pencegahan terjadinya banjir, sebab banyak kasus bencana alam merupakan dampak ulah manusia. Banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air yang besar dari sebuah badan air, sehingga menggenangi daerah sekitarnya yang pada hari biasa kering. Badan air adalah tempat air berada, baik air yang bersifat diam, bergerak maupun mengalir, sehingga yang dimaksud dengan badan air adalah sungai, selokan, saluran, kanal, ataupun bendungan (Purwanto, 2007: 4).

Pemahaman masyarakat Lampung tentang penyebab banjir dari hasil wawancara terungkap, sebagian besar responden korban banjir 21 orang (70 persen) menyatakan, banjir

disebabkan oleh pendangkalan sungai, kondisi tersebut terjadi karena dampak penggundulan hutan atau intensifikasi pertanian di daerah aliran sungai. Lampung secara geografis memiliki ciri-ciri khusus, terdapat bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8 persen sampai 15 persen, daerah tersebut merupakan daerah intensifikasi perkebunan kopi, cengkeh, padi, jagung dan sayur-sayuran, sehingga terjadi pendangkalan sungai. Responden lainnya, 6 orang (20 persen) menyatakan karena saluran yang tersumbat, tiga responden (10 persen) menyatakan karena penggundulan hutan.

Pemahaman masyarakat tentang penyebab dan akibat banjir sangat diperlukan mengingat banjir sering melanda di wilayah Lampung Utara, sehingga masyarakat memiliki sikap sosial yang baik terhadap penanggulangan banjir. Secara organisatoris untuk dapat mencapai hasil yang optimal, penanggulangan bencana banjir diperlukan rencana (perencanaan) dan koordinasi dalam suatu sistem manajemen. W. Nick Carter (1991: 50-60) menyatakan, bahwa manajemen penanggulangan korban bencana alam mencakup lima tahapan. Tahap pertama, persiapan menghadapi bencana, Tahap kedua, penanganan saat terjadi bencana. Apabila bencana benar terjadi ketika bencana sedang terjadi. Tahap ketiga perbaikan kembali (rekonstruksi), merupakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat, membenahi kembali kerusakan akibat bencana. Tahap keempat, tahap rehabilitasi merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Tahap keempat, tahap rehabilitasi merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Tahap kelima, mitigasi atau penjinakan, kegiatan ini biasanya dijadikan program khusus, untuk mengurangi kerusakan yang terjadi, yang mungkin menimpa sekelompok orang tertentu.

Data hasil penelitian 90 persen responden menyatakan pendangkalan sungai dan saluran yang tidak lancar karena pembuangan sampah di sepanjang aliran sungai merupakan penyebab banjir. Pernyataan dari warga tersebut mengindikasikan, bahwa sebagian responden memiliki

pemahaman yang cukup akan terjadinya bencana banjir di daerahnya. Walaupun tingkat pendidikan responden rendah, tetapi karena sosialisasi mengenai bencana seringkali dilaksanakan oleh pihak instansi sosial, maupun instansi lingkungan hidup di Provinsi Lampung, maka pengetahuan responden tentang bencana banjir cukup memadai. Setiap kali datang bencana banjir, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain, memukul kentongan tanda bahaya banjir, berteriak minta tolong, upaya mengungsikan keluarga untuk mencari tempat yang lebih aman, tetapi ada juga yang tetap tinggal di rumah.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa sebagian besar masyarakat sangat memahami penyebab terjadinya banjir di Lampung Utara. Pendapat responden sejalan dengan Sunit (2011), bahwa faktor penyebab banjir di antaranya hujan lebat, menurunnya resistensi daerah aliran sungai (DAS) terhadap banjir akibat adanya perubahan tata guna lahan, kesalahan pembangunan alur aliran sungai seperti pelurusan sungai, pembe-tonan dinding sungai dan faktor pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai disebabkan oleh sedimentasi yang terjadi secara terus menerus akibat erosi yang intensif di bagian hulu sungai. Banjir dapat juga disebabkan oleh semakin meluasnya lahan kritis akibat pembakaran hutan secara besar-besaran, perladangan berpindah, atau pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin meluasnya padang ilalang dan semak belukar. Lahan ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau panjang. Dampaknya adalah terjadinya bencana banjir. Penyebab banjir juga karena pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang besar dan penumpukan sampah di sungai.

Tanggapan dan sikap warga masyarakat terhadap korban pada saat terjadi banjir ternyata menunjukkan sikap bervariasi, 17 responden (56,67 persen) berteriak minta bantuan, 7 orang (23,33 persen) menyatakan, mengungsikan keluarganya, mendirikan tenda umum 4 orang (13,33 persen), dan sisanya mendirikan dapur umum. Setiap datang banjir, masyarakat masih

berperilaku konvensional, yakni berteriak atau memukul kentongan guna memberi peringatan dan meminta pertolongan warga masyarakat yang lain. Sikap masyarakat korban dalam menghadapi banjir sangat bervariasi karena setiap orang atau keluarga memiliki pengalaman dan situasi yang berbeda, sehingga dalam menghadapi banjir masing-masing memiliki perilaku yang berbeda pula. Seringkali perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh nilai budaya serta kearifan lokal setempat.

Terbentuknya sikap sosial masyarakat yang didasari kesadaran dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap kegiatan penanggulangan korban bencana banjir di manapun dan kapanpun mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Jika sikap sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam penanggulangan korban bencana banjir dapat dicapai, pemerintah akan lebih berperan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan aktualisasi segenap potensi masyarakat. Partisipasi menurut Moeljarto Tjokrowinoto (Moelyarto Tjokrowinoto, 1974: 23) adalah penyertaan mental dan energi seseorang dalam situasi kelompok. Partisipasi mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan bagi tercapainya tujuan bersama serta bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir sangat diperlukan dan diharapkan tidak hanya pada saat tanggap darurat untuk memperlancar dan mempercepat evakuasi korban, penyaluran bantuan pangan, sandang pantas pakai, dan obat-obatan. Selain pada saat tanggap darurat, masyarakat secara simultan diharapkan mengupayakan tempat pengungsian yang layak dan pemerataan bantuan bagi korban. Kepedulian masyarakat diharapkan sampai pascabanjir, karena relatif masih rawan sosial ekonomi dan psikologis. Permasalahan yang sering muncul dipermukaan, antara lain korban bencana banjir membutuhkan segera bantuan pangan dan obat-obatan, tetapi kenyataan bantuan diharapkan dari instansi maupun masyarakat masih sering terlambat diterima

para korban karena transportasi sulit menjangkau wilayah korban, data korban belum lengkap dan kurangnya koordinasi antartugas dan tidak transparansinya penggunaan dana rehabilitasi banjir, bahkan bantuan bencana tertunda karena dana APBD belum turun.

Sikap responden bukan korban pada saat terjadi banjir yakni dengan membantu evakuasi dinyatan 9 orang (45 persen), membantu mendirikan tenda dinyatakan 6 orang (30 persen), dan yang menyatakan membantu mendirikan dapur umum sebanyak 5 orang (25 persen). Sikap yang ditunjukkan responden merupakan manifestasi partisipasi yang dilakukan. Sikap responden merupakan perilaku prososial yang memberikan konsekuensi positif bagi si penerima baik dalam bentuk materi, fisik ataupun psikologis, tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi si pemberi. Perilaku personal yang dilakukan responden pada saat terjadi bencana sesuai dengan pendapat Sampson (dalam Sri Dewiyanti, R. 2004) menyatakan perilaku prososial meliputi tindakan menolong dan menyelamatkan suatu objek yang menyangkut tindakan menyumbang (*donating*), berbagi (*sharing*), bekerja sama (*cooperating*), memberi (*giving*), peduli (*caring*), dan memberi fasilitas bagi kesejahteraan orang lain.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mussen dkk. (dalam Dayakini dan Hudaniah, 2003) memandang bahwa perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan menolong, bekerja sama, berbagi perasaan, bertindak jujur, dan bertindak dermawan terhadap orang lain. Terkait dengan sikap yang ditunjukkan responden baik oleh korban banjir maupun responden bukan korban Hari Purwanto (2007: 59) membedakan sikap menjadi sikap individu dan sikap sosial. Sikap sosial secara umum diartikan sebagai “pendidikan” tetapi secara spesifik dapat dikemukakan ada beberapa pendapat tentang sikap. Menurut Zimbarga dan E.B Bensen dalam Abu Ahmadi (1990:163) menyatakan, bahwa sikap adalah predisposisi (keadaan mudah pengaruh) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen; *cognitif, efektif dan behavior*. Da-

lam sikap disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tertentu. Sikap sosial adalah ke arah mana pendirian seseorang dalam kesiapan merespons objek yang bersifat positif terhadap objek sosial secara konsisten, dalam konteks penelitian ini adalah kesiapan warga masyarakat dalam merespons upaya penanggulangan korban banjir. Sikap memiliki peranan penting dalam interaksi manusia. Sosialisasi merupakan upaya penanggulangan korban banjir menjadi bagian penting, karena sosialisasi dimaksudkan untuk pembentukan sikap sosial.

Kepedulian dan solidaritas setiap warga perlu ditumbuh-kembangkan agar terbentuk sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban bencana banjir, karena bencana banjir tidak mudah diprediksi bahkan sulit dihindari. Di berbagai wilayah Indonesia bencana banjir sering kali membawa korban, baik materiil maupun moril, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu ada pameo bahwa wilayah tertentu seperti Jakarta, berbagai wilayah di Indonesia merupakan wilayah langganan banjir. Simpati dan kepedulian setiap warga terhadap warga yang lain, yang sedang menderita karena sesuatu hal, termasuk seperti para korban bencana banjir, merupakan sikap sosial setiap warga negara Indonesia. Sikap sosial masyarakat tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat kegotongroyongan bangsa Indonesia.

Langkah yang dilakukan responden merupakan tahap penanganan saat terjadi bencana seperti yang dikemukakan Nick Carter (1991: 50-60) yakni pada tahap kedua, penanganan saat terjadi bencana. Apabila bencana benar terjadi ketika bencana sedang terjadi, kemudian dilaksanakan pengelolaan kegiatan penanganan terhadap korban bencana. Kegiatan pada tahap ini utamanya ditujukan pada penyelamatan kehidupan dan perlindungan harta benda, membahas tentang perbaikan kerusakan dan dampak lain yang diakibatkan oleh bencana banjir, melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya, mengaktifkan sistem peralatan penanggulangan bencana, melakukan identifikasi masalah dan

upaya penyelamatan, mencukupi persediaan makanan, sandang dan bantuan kesehatan. Menyusun perencanaan anggaran, melakukan pengumpulan dana, pembuatan lokasi penampungan tanggap darurat, karena kegiatannya hanya dua sampai tiga minggu sesudah bencana terjadi. Keadaan darurat diumumkan oleh pihak pemerintah.

Dari hasil wawancara dapat diindikasikan bahwa sikap tanggap masyarakat dalam penanggulangan banjir persentase tertinggi 13 orang (65 persen) menyatakan bahwa masyarakat “cepat tanggap” mengevakuasi korban, terdapat pula responden sebanyak 3 orang (15 persen) menyatakan masyarakat “sangat cepat tanggap” dari pernyataan tersebut 80 persen responden menyatakan positif. Namun, terdapat pula responden yang menyatakan tanggapan masyarakat “biasa saja”. Hal itu terjadi karena bencana banjir dianggap sebagian masyarakat sudah biasa terjadi. Sikap tanggap tersebut adalah bentuk dari kesadaran untuk saling tolong menolong antarwarga. Dari tingginya persentase responden yang menyatakan positif 80 persen, mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat terhadap bencana banjir di Lampung Utara cukup tinggi. Wujud kepedulian tampak dari sikap tanggap dan aktivitas masyarakat dengan cepat mengevakuasi korban banjir. Memang dewasa ini banyak pendapat di masyarakat bahwa sikap kepedulian dan nilai-nilai kegotongroyongan mengalami erosi, tergerus oleh arus globalisasi, bahkan nilai kegotongroyongan masyarakat cenderung menurun, sebab terkikis oleh arus nilai materialisme atau pasar global yang dikembangkan oleh kapitalisme barat.

Dari hasil penelitian di atas terbukti sikap sosial masyarakat menanggapi penanggulangan banjir, menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan sikap sosial tersebut tidak terlepas dari motivasi seseorang, motivasi tersebut berkaitan dengan kesadaran masyarakat, pengetahuan, serta keterampilan juga pemahaman tentang dampak dari bencana banjir yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, juga keterampilan ataupun pengalaman dari seseorang. Dari data di atas mengindikasikan, bahwa nilai

pi'il pesengiri dan *sakai sambayan* yang menghormati hak azasi manusia dan selalu hidup bergotong royong kepada sesama, termasuk pula warga yang menjadi korban bencana banjir, masing dipegang warga masyarakat. Dari hasil penelitian terungkap, bahwa tradisi dan kearifan lokal masih lekat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Berkembangnya teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat, meningkatkan pengetahuan agar memiliki sikap tanggap sosial dan bertanggung jawab pada lingkungannya. Kesadaran dan pemahaman tentang usaha penanggulangan bencana banjir yang terencana dan terkoordinir perlu dimiliki oleh masyarakat dan pada gilirannya masyarakat merasa memiliki sikap yang sama (sikap sosial) antara warga yang satu dengan yang lain.

Kepedulian dan solidaritas setiap warga perlu ditumbuhkembangkan agar terbentuk sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban bencana banjir, karena bencana banjir tidak mudah diprediksi bahkan sulit dihindari. Di berbagai wilayah Indonesia bencana banjir sering kali membawa korban, baik materil maupun moril, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu ada pameo bahwa wilayah tertentu merupakan wilayah langganan banjir. Simpati dan kepedulian setiap warga terhadap warga yang lain, yang sedang menderita karena sesuatu hal, termasuk seperti para korban bencana banjir, merupakan sikap sosial setiap warga negara Indonesia. Sikap sosial masyarakat tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat kegotongroyongan bangsa Indonesia.

Menurut Graham Richards, pada hakekatnya sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan, yang kemudian diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek serta situasi yang berkaitan dengannya. Sikap terutama digambarkan sebagai kesiapan untuk selalu menanggapi dengan cara tertentu, serta menekankan implikasi perilakunya. Relevansi sikap terhadap perilaku, semakin besar relevansi spesifik sikap terhadap perilaku, semakin tinggi pula korelasi

antara kedua hal tersebut semakin tinggi pula seseorang melakukan perilaku yang nyata. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi baik oleh sikap seseorang maupun oleh suatu situasi. Apabila tekanan situasi sangat kuat, kondisi tersebut akan mempengaruhi perilaku, tetapi apabila tekanan situasi lemah, perilaku akan menjadi lemah. Mengacu pada teori keseimbangan tekanan atas konsistensi di antara akibat dalam suatu sistem kognitif yang sederhana. Pada sistem tersebut ada dua objek terdapat dua penilaian untuk mencapai keseimbangan, penilaian individu tentang setiap objek dan hubungan tentang objek satu sama lain. Hubungan yang seimbang membuat gambaran yang pantas dan masuk akal, hubungan yang seimbang merupakan motif utama mendorong seseorang ke arah keseimbangan, sehingga dapat dicapai dan dipelihara bentuk hubungan sosial yang selaras dan seimbang (Graham Richards, 2010: 38).

Sikap sosial yang ditunjukkan masyarakat terhadap korban banjir di lokasi penelitian perlu dikembangkan karena sikap tersebut dapat meningkatkan kepedulian warga terhadap segala keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. oleh karena itu, kesetiakawanan sosial perlu dikembangkan pada diri pribadi dan setiap warga masyarakat bahkan setiap warga negara Indonesia. Sugeng Bayu Wahyono menyatakan kepekaan terhadap nasib orang lain sesungguhnya menjadi kadar solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Semakin dalam dan semakin nyata kepekaan sosial seseorang terhadap nasib warga masyarakat yang terkena bencana, semakin tinggi pula kadar kesetiakawanan sosial yang mereka miliki (Ikawati dan Chatarina Rusmiyati, 2009:23).

Ciri nilai kesetiakawanan sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi antarpara anggotanya dan diturunkan dari generasi ke generasi (Abdul Syani, 1995:51). Kandungan nilai utama kesetiakawanan sosial menurut Haryati Soebandio, Soedjito Sosrodiharjo (Gunanto Surjono, dkk. 1998: 27-31) mengandung beberapa aspek antara lain: Kepedulian sosial, gotong royong, ikhlas berkorban, dan

kebersamaan. Lebih lanjut menurut Gunanto (1998) indikator Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) merupakan penjabaran dari nilai utama yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial nasional.

Nilai-nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Lampung dalam menanggulangi banjir ditunjukkan dalam bentuk partisipasi. Dalam teori sosial, pendekatan yang digunakan untuk menunjuk peran masyarakat adalah pendekatan partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Moelyarto Tjokrowinoto (1974: 23) mendefinisikan, partisipasi sebagai penyertaan mental dan energi seseorang dalam situasi kelompok. Partisipasi mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan bagi tercapainya tujuan bersama serta bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Holil Soeliman (1985:6) menyatakan, partisipasi masyarakat mencerminkan kehidupan demokratis, ditandai dengan adanya penentuan kebutuhan dan usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didasari tanggung jawab. Masyarakat berpartisipasi dalam bentuk uang, barang, pikiran, tenaga, keterampilan dan kemahiran.

Berbagai konsep partisipasi pada dasarnya dapat diimplementasi pada satu mata rantai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi dalam penanggulangan banjir. Manifestasi masyarakat dalam penanggulangan banjir tersaji pada tabel 1.

Manifestasi masyarakat diwujudkan dalam partisipasi yang dilakukan dalam penanggulangan banjir, baik pada saat terjadi banjir, tahap rehabilitasi, rekonstruksi maupun tahap mitigasi. Bentuk partisipasi yang dilakukan sebagian besar, terutama korban banjir, pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, sedangkan partisipasi yang dilakukan masyarakat bukan korban 45 persen berpartisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga dan 25 persen dalam bentuk tenaga. Partisipasi dilakukan masyarakat baik oleh korban maupun bukan korban.

Ciri khas partisipasi yang dilakukan masyarakat Lampung secara keseluruhan merupakan adalah *Sakai Sambayan*, dilakukan dalam bentuk gotong royong, tolong menolong, bahu-membahu, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan pihak lain, tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran dalam memberi bantuan penanggulangan banjir. Masyarakat secara bersama-sama membantu korban banjir, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. Masyarakat aktif dalam berbagai kegiatan, terutama untuk memberikan pertolongan kepada korban banjir. Masyarakat juga selalu hadir dalam kegiatan rapat untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, bahkan masyarakat terutama bukan korban secara sukarela menghimpun dana dari masyarakat sekitar,

Tabel 1
Manifestasi Partisipasi Masyarakat

No	Partisipasi Masyarakat	Korban		Bukan		Total	
		F	%	f	%	f	%
1	Pikiran	2	7	-	-	2	4
2	Tenaga	7	23	5	25	9	18
3	Harta benda	1	3	-	-	2	4
4	Keterampilan	2	7	2	10	3	6
5	Sosial	2	7	-	-	3	6
6	Tenaga dan harta	2	7	-	-	4	13
7	Pikiran dan tenaga	12	40	9	45	21	42
8	Pikiran dan harta	2	7	4	20	6	12
Jumlah		30	100	20	100	50	100

Sumber: Jawaban Responden (N=50)

menyediakan konsumsi untuk membantu korban banjir.

Prinsip lain yang dimiliki masyarakat Lampung adalah *Nemui Nyimah*, berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap pihak yang berhubungan dengan mereka. Masyarakat saling bahu membahu dalam meng-evakuasi korban banjir tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Masyarakat dengan penuh kesadaran bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada kepada pihak lain, dengan memberi bantuan baik berupa tenaga pada saat terjadi banjir dengan menggunakan perahu karet agar masyarakat yang terjebak dalam banjir dapat segera ditolong. Partisipasi masyarakat pada tahap evakuasi tidak selamanya berjalan lancar, mengingat tidak semua korban mau diajak untuk mengungsi. Masyarakat sebagian tetap berkeinginan untuk bertahan di rumahnya, walaupun rumah sudah tergenang banjir selama sehari-hari, meskipun beberapa korban tetap bersikukuh untuk bertahan, masyarakat tetap bermurah hati dalam bertutur kata, sopan santun, dan ramah tamah terhadap korban banjir. Masyarakat, baik korban maupun bukan korban tetap mempertahankan prinsipnya dalam penanggulangan banjir, yakni *Nengah Nyappur*, ditunjukkan dalam berpartisipasi secara aktif bersama-sama masyarakat dan elemen yang ada saling bekerja sama terutama pada saat terjadi banjir sehingga korban segera mendapat pertolongan.

Gambaran tentang manifestasi partisipasi yang dilakukan responden, baik oleh korban maupun bukan korban, sejalan dengan pendapat Soelaiman dalam Iskandar (1993:74), secara konseptual partisipasi sosial merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial; demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berazaskan pemerataan keadilan sosial; pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan; pemupukan harga diri dan kepercayaan kepada kemampuan masyarakat

dan pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa sikap masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana diaktualisasikan dalam nilai-nilai kegotongroyongan. Partisipasi yang dilakukan dalam bentuk kegotongroyongan masyarakat, menurut korban berada pada kriteria “baik”, terbukti 14 orang (46,67 persen) menyatakan bahwa nilai kegotongroyongan dalam penanggulangan banjir dalam arti memadai, kemudian 9 orang (30 persen) menyatakan “cukup”, terdapat pula 3 orang (10 persen) yang menyatakan “sangat baik”. Dari 20 bukan korban banjir, 16 orang (80 persen) menyatakan “baik” 4 orang (20 persen) menyatakan “sangat baik”. Jika dikaji lebih lanjut, ternyata 92 persen dari keseluruhan responden, 50 orang menyatakan positif, dalam arti warga masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan dalam penanggulangan banjir.

Sikap tersebut tampak dari perilaku dan tindakan dalam penanggulangan korban banjir, terutama pada saat mengevakuasi korban, dibutuhkan kecepatan sikap tanggap masyarakat untuk menanggulangi banjir. Kegotongroyongan yang dilakukan masyarakat Lampung merupakan bentuk kebersamaan masyarakat, meskipun bentuk gotong royong sudah berbeda manifestasinya, seperti diwujudkan dalam pemberian bantuan, baik dalam wujud uang, tenaga, maupun pikiran, tetapi pada prinsipnya masyarakat berupaya membantu korban banjir untuk meringankan penderitaannya.

Terbentuknya sikap sosial masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam penanggulangan korban bencana banjir diperlukan dan diciptakan motivasi serta prakondisi yang memungkinkan tumbuhnya sikap sosial masyarakat. Untuk berpartisipasi dapat dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan pengetahuan tentang bencana alam banjir, sebab akibatnya, memiliki sikap sosial terhadap korban bencana banjir dan aksi sosial dalam mewujudkan partisipasinya terhadap upaya-upaya penanggulangan korban

bencana banjir. Guna menghindari buruknya penderitaan korban bencana alam khususnya korban bencana banjir, diperlukan prakondisi bagi masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan secukupnya tentang hal ihwal bencana alam pada umumnya dan bencana banjir pada khususnya, baik masyarakat yang sering tertimpa bencana maupun masyarakat luas, khususnya masyarakat di lingkungan korban bencana banjir.

Sikap sosial yang ditunjukkan responden menurut Staub (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2003), dipengaruhi salah satu perilaku personal yakni adanya empati yaitu kemampuan individu untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati erat kaitannya dengan pengambilalihan peran dalam hal ini berbagai peran responden dalam berpartisipasi penanggulangan banjir.

Pihak yang memperhatikan korban banjir, menurut hasil wawancara terungkap bahwa pihak yang memperhatikan korban banjir sebagian besar responden 18 orang (60 persen) menyatakan, bahwa pemerintah merupakan pihak yang banyak memperhatikan dan aktif dalam penanggulangan bencana banjir, disusul oleh organisasi sosial sebanyak 8 orang (27 persen). Masing-masing terdapat 4 warga (13 persen) masyarakat di sekitar kawasan bencana dan tetangga korban peduli dalam menanggulangi bencana banjir. Dari data tersebut terindikasi, bahwa pihak pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penanggulangan banjir. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Provinsi Lampung, pada hakekatnya sudah memiliki sistem mekanisme kerja dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini instansi sosial dan badan penanggulangan bencana alam (banjir) daerah, yang terjadinya hampir setiap tiga sampai lima tahun sekali.

Ife, J. dan Tesoriero, F. (2006:312-313) mengemukakan, bahwa mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu proses yang membutuhkan keterampilan, dan melibatkan pemantauan terus menerus tentang dampaknya terhadap rakyat. Partisipasi harus menghasilkan keluaran

positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi, kontrol terhadap lingkungan seseorang, dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan memberi dampak pada kehidupan orang, sebagai tujuan partisipasi sosial merupakan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

4. Rehabilitasi Sosial dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Banjir

Pada saat rekonstruksi masyarakat berbekal tekad serta sikap sosial yang dimiliki, berusaha mencari dan menyalurkan bantuan yang diperoleh. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial, masyarakat berpartisipasi secara aktif, dibuktikan dengan pernyataan dari berbagai pihak, bahwa sikap dan tindakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi sosial dalam bentuk mencari bantuan sosial guna merekonstruksi kerusakan akibat banjir. Hal ini dibuktikan dari pernyataan responden yang terdiri dari 50 orang, mereka adalah masyarakat korban banjir dan warga yang bukan korban banjir, 29 orang (58 persen) menyatakan “sangat aktif”, 15 orang (30 persen) menyatakan “aktif”, sedang yang menyatakan “cukup aktif” sebanyak 4 orang (8 persen).

Partisipasi masyarakat baik oleh korban maupun bukan korban sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana. Untuk dapat mencapai hasil yang optimal, penanggulangan bencana banjir diperlukan rencana (perencanaan) dan koordinasi dalam suatu sistem manajemen. W. Nick Carter (1991: 50-60) menyatakan, bahwa manajemen penanggulangan korban bencana pada tahap ketiga, perbaikan kembali (rekonstruksi), merupakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat, membenahi kembali kerusakan akibat bencana. Proses ini dapat memakan waktu lebih panjang, mungkin lima sampai 10 tahun, merupakan tahap pemulihan bentuk fisik seperti semula sebelum terjadi bencana banjir. Pada tahap ini dilakukan perbaikan agar semua infrastruktur dapat berfungsi kembali, meliputi kegiatan perbaikan kembali fasilitas pelayanan yang penting bagi warga, perbaikan kembali ba-

ngunan umum serta rumah penduduk, juga diupayakan adanya rumah darurat, dan penanganan dan penyembuhan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang menderita karena bencana banjir.

Akibat banjir sangat merugikan kehidupan masyarakat, sering terjadi korban jiwa, biasanya korban meninggal karena terbawa aliran air yang sangat kencang, atau tenggelam dalam air banjir yang diam karena tidak memiliki keterampilan berenang. Banjir juga mengakibatkan kerugian harta benda, berupa rusaknya rumah, harta benda yang terbawa oleh air. Di sektor pertanian dan perkebunan, banjir yang merendam persawahan dan perkebunan, menyebabkan tanaman padi yang hampir panen menjadi puso (Purwanto, 2007: 6-18).

Partisipasi masyarakat dilakukan secara bersama-sama antara korban maupun masyarakat bukan korban, baik dalam tahap rekonstruksi maupun rehabilitasi. Pada tahap rekonstruksi pembangunan jembatan, tujuh jembatan, satu jembatan permanen putus, delapan TK/PAUD, tiga SD dan dua bangunan SMP, tempat ibadah rusak berat, ratusan rumah terendam banjir dan satu rumah hanyut terbawa banjir. Partisipasi yang dilakukan masyarakat, baik oleh korban maupun bukan korban, saling bantu membahu untuk memperbaiki berbagai rumah dan fasilitas yang rusak, seperti pembangunan MCK yang merupakan kebutuhan pokok bagi korban. Warga secara sukarela bergotong royong mengumpulkan bahan bangunan untuk membuat jembatan darurat, agar bahan makanan, pakaian, obat-obatan untuk korban dapat segera diterima. Masyarakat bersama PMI dan BNPB daerah mendirikan dapur umum.

Partisipasi juga diberikan dalam bentuk pikiran dan tenaga, terutama oleh mereka yang bukan korban, sebesar 45 persen dalam bentuk tenaga, 25 persen dalam bentuk pikiran, dan harta diberikan 20 responden. Warga masyarakat bukan korban berpartisipasi dalam memberi bantuan, baik berupa makanan maupun obat-obatan, secara sukarela mereka menghimpun dana untuk meringankan beban korban banjir.

Partisipasi masyarakat juga diberikan oleh mereka yang kebetulan sebagai tokoh agama, baik sebagai korban maupun bukan korban, dengan memberi bimbingan spiritual keagamaan, dimaksudkan untuk menguatkan keimanan dan mental seseorang. Bencana merupakan salah satu ujian dari Tuhan yang diberikan sesuai dengan kemampuannya, dengan kekuatan iman korban banjir dapat menerima dengan ikhlas dan sabar sebagai pelajaran hidup, bahwa di balik kesukaran berupa bencana terdapat kemudahan. Selain memberikan bimbingan spiritual, responden memberi pendampingan secara psikologis pada warga lanjut usia dan anak-anak korban banjir, terutama diberikan oleh masyarakat bukan korban yang kebetulan sebagai tokoh masyarakat dan TKSK. Pemberian bantuan psikologis juga diperlukan, mengingat berbagai dampak yang dialami oleh korban, selain berbagai kerugian dalam bentuk perkebunannya rusak, rumah mereka juga terendam sehingga menimbulkan kecemasan bagi korban banjir.

Bimbingan psikologis menurut Faturochman sangat diperlukan, karena adanya perubahan psikis/kejiwaan/mental yang dirasakan seperti perubahan perilaku, marah, panik, kacau, traumatis. Perubahan seperti muncul rasa cemas akan masa depan, sedih, tertekan, putus asa, tidak berdaya, mudah tersinggung. Bencana tidak hanya menimbulkan ketakutan tetapi juga menghilangkan dorongan untuk kerja, untuk maju, dan berkembang bahkan dapat melenyapkan dorongan untuk hidup. Depresi atau kesedihan yang mendalam dapat berkembang menjadi keputusan korban merasa bahwa segala usaha yang dimiliki telah tiada (Faturochman, 2014).

Wujud partisipasi responden pada tahap rekonstruksi, seperti yang dikemukakan dalam teori sosial, menunjuk pada peran masyarakat sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Menurut Davis (1967:128): *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*. Dari pengertian ini terdapat tiga

hal yang penting dalam partisipasi: Pertama, keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik. Kedua, partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi kelompoknya, dalam arti mereka menyumbangkan inisiatifnya untuk mencapai sasaran kelompok. Ketiga, mendorong orang untuk ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas kelompok.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan sesuai dengan yang dikemukakan Santoso S. Hamijaya (1974:6) yang menyatakan, partisipasi masyarakat dapat dirinci menurut bentuknya, yaitu partisipasi pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta sosial. Secara instrumental Talizidu Ndraha (1990) mengemukakan, bahwa bentuk-bentuk partisipasi dapat dikelompokkan dalam lima bentuk dukungan, yakni partisipasi buah pikiran, keterampilan, tenaga, harta benda.

Dari hasil wawancara terungkap, bahwa 96 persen masyarakat secara aktif melaksanakan merekonstruksi dampak banjir, walaupun masih belum terarah. Berbagai bentuk partisipasi sudah dilakukan oleh responden secara sukarela dan penuh kesadaran. Data di atas mengindikasikan, bahwa sikap kesetiakawanan sosial masyarakat Kabupaten Lampung di lokasi bencana banjir masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa nilai tradisi *nemui nyimah*, yaitu nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi sikap bermurah hati, saling membantu jika terjadi musibah yang menimpa warga di sekitarnya, juga nilai *nengah nyapur* yaitu nilai yang mengatur sikap pergaulan membuka diri, ikut serta berpartisipasi pada suatu perbuatan atau perilaku yang baik, dan membawa kemajuan bagi warga masyarakat di lingkungannya. Walaupun ketergantungan masyarakat pada pemerintah cukup tinggi, tetapi karena berkaitan dengan otonomi, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berusaha menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi setiap anggota masyarakat. Partisipasi tersebut dapat diciptakan melalui prakondisi antara lain, otonomi dan kebebasan untuk berpartisipasi bagi setiap anggota masyarakat,

menumbuhkan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam, khususnya banjir yang secara rutin melanda kawasan pemukiman warga.

Hasil observasi tampak bahwa upaya rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan lancar dan mudah, karena kepedulian dan partisipasi masyarakat serta kerja sama yang baik antara masyarakat, orsos, pengusaha juga pemerintah daerah. Upaya penanggulangan banjir merupakan upaya yang berkelanjutan guna mereduksi atau meminimalisir dampak suatu bencana. Tujuan yang ingin dicapai agar masyarakat di daerah bencana berdaya, merasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mengerti dan memahami betul, selalu waspada dengan kondisi lingkungannya. Dari hasil tersebut dapat dimaknai berbagai pihak berpartisipasi dalam tahap rekonstruksi.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Teti Ati Padmi dkk, (2013: 5), bahwa keberhasilan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang studi kebijakan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat, yang merupakan studi kasus kampung siaga bencana dalam mengurangi risiko bencana alam di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman, DIY, disebutkan bahwa upaya untuk penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara menyeluruh, masyarakat merupakan unsur penting sebagai basis utama dalam penanggulangan bencana (*community based disaster management*). Di satu sisi, masyarakat sebagai aktor utama selama proses penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya, di sisi lain masyarakat (utamanya yang tinggal di daerah rawan bencana) adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana.

Partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi masih sebatas tenaga dan pikiran, pihak yang lebih banyak berpartisipasi pada tahap rehabilitasi terutama dana menurut infoman lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan organisasi sosial. Upaya yang dilakukan pihak

pemerintah dengan meningkatkan kualitas bangunan agar lebih kuat, sehingga apabila terjadi bencana bangunan lebih kuat diterjang derasnya air. Pada tahap ini partisipasi masyarakat lebih banyak pada partisipasi berbentuk tenaga dan pikiran agar bangunan lebih tahan lama terhadap terjangban banjir. Hal tersebut sesuai dengan pendapat W Nick Carter (1991), pada tahap keempat penanggulangan bencana yakni tahap rehabilitasi, merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana, pengalaman yang diperoleh selama menghadapi bencana menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijaksanaan pada masa mendatang. Kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan program atau teknologi tertentu, yang memungkinkan bangunan dapat lebih tahan bencana banjir.

5. Penghambat dan Pendukung Rehabilitasi Sosial Korban Banjir

Kendala dalam penyaluran bantuan, menurut responden sering kali menjadi faktor penghambat dalam kegiatan rekonstruksi rehabilitasi sosial pada korban bencana. Kondisi tersebut disebabkan berbagai hal antara lain kurangnya kerja sama berbagai instansi pemerintah daerah, pihak organisasi sosial ataupun lembaga bantuan dari luar negeri. Pada tahap rekonstruksi terungkap dari data hasil penelitian, menurut responden korban 19 (63,33 persen) menyatakan “kadang-kadang ada kendala” 3 orang (10 persen) menyatakan ada kendala, selanjutnya 2 orang (6,67 persen) menyatakan sering kali ada kendala dan 4 orang (13,33 persen) menyatakan selalu ada kendala, sedangkan responden bukan korban menyatakan memang ada kendala bantuan pada saat terjadinya bencana, tetapi kondisi tersebut dapat segera diatasi dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bantuan segera terealisasi.

Dari hasil wawancara terhadap responden bukan korban terungkap bahwa dari 20 orang responden 12 orang (60 persen) menyatakan penyaluran bantuan “cukup terkoordinasi”, sedangkan dua orang (10 persen) menyatakan

“kurang terkoordinasi”. Dari pernyataan tersebut terungkap 70 persen memberi pendapat negatif. Mereka menyatakan adanya koordinasi hanya di tingkat pejabat instansi terkait dan pengurus organisasi sosial, tetapi pada tataran pelaksana operasional di lokasi bencana, ternyata koordinasi sangat kurang. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan bantuan dari pihak pemerintah kurang sesuai dengan yang dibutuhkan korban banjir, tetapi secara umum bantuan dari pemerintah cepat diterima oleh korban banjir.

Data di atas mengindikasikan bahwa kelancaran penyaluran bantuan pelaksanaan rekonstruksi dari pemerintah menurut korban dan bukan korban 28 orang (56 persen) menyatakan “cepat diberikan” dan “cukup cepat diberikan”, tetapi ada juga pendapat lain dari responden 18 orang (36 persen) menyatakan bantuan tidak cepat diberikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, antara lain penyumbang tidak memiliki fasilitas transportasi untuk sampai di lokasi banjir. Kondisi tersebut berakibat banyak bantuan yang menumpuk di satu lokasi, karena rusaknya infrastruktur jalan sebagai dampak dari bencana alam, sehingga bantuan sulit sampai di lokasi penampungan korban banjir.

Penyebab keterlambatan penyaluran bantuan, disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian terungkap, 38 orang (76 persen) menyatakan keterlambatan dan hambatan dalam penyaluran bantuan karena kesulitan transportasi, sulit menjangkau masuk lokasi bencana. Kendaraan besar sulit masuk ke lokasi sehingga banyak bantuan yang lambat diterima oleh korban banjir, hanya kendaraan kecil yang dapat masuk ke lokasi bencana banjir. Responden bukan korban menyatakan pihak pelaksana kesulitan memperoleh bantuan peralatan transportasi untuk mengangkut bantuan. Hal ini membuktikan bahwa petugas di lapangan kurang koordinasi dengan baik. Data hasil wawancara terungkap, 10 responden (20 persen) menyatakan kurang adanya kerja sama dan koordinasi antarpetugas operasional di lokasi bencana, 5 orang (10 persen) menyatakan keterlambatan disebabkan ketidaklengkapan data korban. Hal

tersebut sesuai dengan hasil penelitian Akhmad Purnama & Murdiyanto (2013: 194) tentang penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam yang merupakan studi kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura, terungkap bahwa dalam pemberian bantuan kepada korban bencana terdapat kendala dan kekurangan disebabkan bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan korban, juga kendala kondisi daerah bencana yang sangat sulit, memungkinkan bantuan yang diberikan tidak tepat waktu diterima korban, walaupun beberapa instansi terkait sudah melaksanakan koordinasi dengan baik

6. Pelaksanaan Mitigasi (penjinakan) Penanggulangan Bencana Banjir

Mitigasi merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan penanggulangan bencana. Data hasil penelitian terungkap, 50 orang responden yang terdiri dari korban dan bukan korban banjir, menunjukan 25 orang (50 persen) menyatakan, bahwa pihak yang berkoordinasi dengan masyarakat adalah pihak pemerintah desa dengan organisasi sosial setempat, dan petugas Dinas Sosial, selanjutnya 15 orang (30 persen) menyatakan koordinasi antara pemerintah desa dengan organisasi sosial lokal. Dari data di atas sebanyak 80 persen responden menyatakan, bahwa mereka bekerja sama dengan berbagai pihak membuktikan bahwa masyarakat dan pejabat pemerintah desa, bersama pengurus organisasi sosial lokal mampu berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan mitigasi (penjinakan) terhadap bencana banjir di daerahnya, tanpa menunggu uluran bantuan dari pihak pemerintah kota/kabupaten bahkan sampai tingkat pemerintah Provinsi Lampung. Walaupun terdapat pula 10 orang (20 persen) yang menyatakan menunggu uluran bantuan dan kebijakan dari pihak pemerintah kabupaten dan kota.

Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan berbagai elemen yang ada sebagai wujud dari bentuk partisipasi dalam penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat, baik korban maupun bukan korban, terlibat aktif bergotong

royong dalam pembangunan jembatan dan tanggul serta pengerukan aliran sungai. Masyarakat juga berpartisipasi sosial ikut aktif dalam kegiatan penyuluhan, berupa penyadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Santoso S. Hamijaya (1974:6) yang menyatakan, partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, dengan ikut pertemuan dalam bentuk sasehan, arisan, penyuluhan dan seminar.

Kegiatan mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari bencana. Partisipasi masyarakat dalam tahap penanggulangan bencana yakni mitigasi sesuai dengan yang dikemukakan Anna's Faujah yang menyatakan upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta untuk memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk nonstruktural, di antaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah (Anna' Faujiah, 2013). Mitigasi dapat dilakukan baik melalui pembangunan dapat dilakukan dalam fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini lebih banyak pada partisipasi tenaga yakni dalam pembangunan jembatan yang rusak berat akibat diterjang banjir. upaya mitigasi yang dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural.

Kegiatan mitigasi merupakan program khusus untuk mengurangi kerusakan yang terjadi pada bencana yang akan datang, pelaksanaan mitigasi mengarah pada upaya pencegahan dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Mitigasi lebih diartikan sebagai upaya pencegahan, guna mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana di kemudian hari, juga memberikan pengetahuan pada masyarakat

tentang sistem perlindungan infrastruktur yang vital dan perbaikan sistem pertanian.

Permasalahan yang menghambat pelaksanaan manajemen bencana tidak dapat diprediksi, mengingat setiap wilayah secara geografis dan nilai sosial budayanya memiliki kondisi yang berbeda. Kendala sulitnya transportasi masuk ke wilayah bencana karena infrastruktur yang rusak, juga jauhnya jarak antara ibukota kabupaten atau kecamatan dengan wilayah bencana. Namun demikian sebenarnya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah mengalokasikan dana untuk bencana banjir, terutama dana untuk tanggap darurat. Pos anggaran tersebut administrasinya tidak rumit apabila dibandingkan dengan pembiayaan rekonstruksi setelah bencana. Apabila dikaji dari sering tidaknya bantuan pemerintah daerah mengalami keterlambatan, terungkap dari 50 responden 18 orang (36 persen) menyatakan sangat sering terlambat, tetapi 26 orang (52 persen) tidak tahu. Ketidaktahuan responden terjadi karena korban yang dapat mengakses informasi mengenai keberadaan dana sangat terbatas.

Partisipasi dalam kegiatan mitigasi merupakan suatu kegiatan penanggulangan bencana pada tahap kelima, seperti yang dikemukakan Nick Carter (1991), kegiatan ini biasanya dijadikan program khusus untuk mengurangi kerusakan yang terjadi, yang mungkin menimpa sekelompok orang tertentu. Tahap penjinakan (mitigasi) pada umumnya diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan yang dilakukan pada saat bencana sedang terjadi, kegiatan ini dimaksudkan guna mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Bentuk kegiatan penjinakan meliputi pemberlakuan undang-undang tentang tata ruang bangunan, serta penerapan peraturan tata guna tanah, juga pemberlakuan peraturan yang difokuskan pada keselamatan penggunaan tanah, lautan serta udara.

Mitigasi juga diartikan sebagai program perbaikan sistem pertanian untuk mengurangi gangguan musim panen, pengenalan sistem perlindungan infrastruktur vital. Upaya membangun prasarana pelengkap, misalnya pembangunan

peralatan pencegahan banjir (pintu air, dan saluran). Nick mengemukakan, mitigasi (penjinakan) merupakan kegiatan yang bertujuan memperkecil kerugian yang timbul akibat peristiwa bencana terutama terhadap jiwa raga manusia, harta benda, dan berbagai bangunan. Kegiatan mitigasi meliputi pembanunan tanggul/terasiring, gerakan penanaman pohon pelindung/penghijauan, dan penataan pemukiman atas dasar kerawanan.

Kelima tahapan manajemen penanggulangan bencana diberikan kepada seluruh warga masyarakat daerah rawan bencana khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Sependapat dengan W Nick Carter, bahwa apabila kesadaran dan pemahaman tentang usaha penanggulangan bencana alam termasuk di dalamnya bencana banjir telah dimiliki oleh masyarakat, pada hakekatnya masyarakat telah memiliki perencanaan untuk peduli atau memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Kepedulian terjadi karena adanya situasi sosial yang mendorong solidaritas setiap individu atau setiap warga, yaitu rasa bersatu dalam kepentingan, kehendak, dan perbuatan dalam bersimpati pada penderitaan orang lain karena adanya bencana alam banjir.

D. Penutup

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, warga masyarakat Lampung “cukup paham” pengetahuan mereka tentang bencana banjir, sebagian besar responden menyatakan penyebab banjir adalah penggundulan hutan yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai, karena intensifikasi pertanian dan perkebunan kopi dan lada. Secara geografis, Lampung Utara memiliki sungai yang mengalir dari arah barat ke timur. Arah barat merupakan wilayah berbukit-bukit, sedangkan arah timur landai. Aliran sungai sangat potensial untuk pengembangan irigasi, tetapi jika tataguna airnya kurang baik akan terjadi banjir pada daerah yang landai tanahnya.

Sikap sosial masyarakat Lampung dalam upaya penanggulangan banjir “baik”, terutama persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, yakni berteriak dan memukul kentongan,

cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat masih bersifat tradisional, belum memanfaatkan peralatan informasi dan telekomunikasi yang lebih modern dan canggih. Hal tersebut membuktikan bahwa sikap kesetiakawanan sosial dan perilaku kegotongroyongan masyarakat masih cukup tinggi. Pihak yang memperhatikan korban banjir ternyata adalah pihak pemerintah daerah Provinsi Lampung dan berbagai organisasi sosial lokal. Kadang-kadang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan, terhambat karena kurangnya data korban tetapi secara umum bantuan yang diberikan pada korban cukup cepat karena partisipasi dari masyarakat setempat.

Upaya rehabilitasi sosial dilakukan dengan mencari dan menyalurkan bantuan dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan organisasi sosial baik dalam negeri maupun luar negeri, atau dengan pihak pengusaha swasta. Faktor penghambat penanggulangan bencana banjir di Provinsi Lampung 76 persen responden menyatakan kesulitan transportasi, untuk masuk di daerah bencana. Faktor pendukungnya adalah sikap kesetiakawanan sosial dari masyarakat, masih melekatnya sikap gotong royong sehingga mempercepat dan memperlancar bantuan serta pemulihan akibat bencana banjir.

Rekomendasi yang diusulkan adalah perlu kiranya upaya mitigasi terhadap bencana dengan melakukan pencegahan terhadap bencana banjir dengan peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang bangunan. Penerapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan, penggunaan tanah, dan perbaikan sistem pertanian. Beberapa upaya antara lain perlunya perbaikan saluran air yang tersumbat atau dangkal, pengorganisasian dan pengurusan bantuan bagi korban, perlu pembagian bantuan secara adil, pembentukan organisasi penanggulangan korban banjir tingkat desa, sosialisasi perihal faktor penyebab banjir dan akibatnya, kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir, penyediaan lumbung (pangan) desa guna menghadapi terjadinya banjir, agar tidak tergantung pada bantuan orang lain.

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang faktor penyebab dan akibat banjir, dari berbagai instansi terkait seperti halnya dinas kehutanan, sosial, dan kantor kimpraswil (Pemukiman dan Prasarana Wilayah). Pengawasan terhadap penggundulan hutan, pemanfaatan hutan dengan tata ruang, menyosialisasikan pelestarian lingkungan dan pemeliharaan aliran sungai. Meminimalisir dampak kerusakan hutan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, dengan meningkatkan keterampilan warga masyarakat jika terjadi banjir. Mempersiapkan peralatan transportasi seperti halnya perahu karet, maupun peralatan komunikasi dan informasi, sehingga secara cepat dapat mengevakuasi korban dan penyaluran bantuan. Mengembangkan program kampung siaga bencana di Kabupaten Lampung Utara secara optimal, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang kampung siaga bencana. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa kampung siaga bencana merupakan wadah formal untuk mewadahi partisipasi atau sikap sosial masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir berbasis masyarakat, dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghimpun dan menggali potensi masyarakat untuk menghadapi bencana banjir yang setiap waktu melanda Kabupaten Lampung Utara.

Melalui wadah program kampung siaga bencana tersebut diharapkan masyarakat memahami akan bahaya dan resiko bencana banjir, juga terbentuknya jaringan siaga bencana berbasis masyarakat, serta memperkuat interaksi sosial dan sikap perilaku sosial masyarakat. Dalam wadah kampung siaga bencana berupaya mengorganisasikan sikap dan partisipasi sosial masyarakat di daerah rawan bencana banjir agar berdaya dan tetap siaga, terlatih menghadapi bencana banjir. Berusaha mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat menghadapi bencana banjir secara berkesinambungan, melakukan motivasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar berperan aktif dalam kegiatan tanggap darurat dan pascabencana, membantu mengarahkan

relawan dan kapasitas yang dimilikinya, terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.

Pustaka Acuan

- Abdul Syani. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Dunia Pustaka
- Akhmad Purnama dan Murdiyanto, *Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam*, Studi kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam Di Kota Jayapura, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial '
- Anna' Faujiah 22 Desember 2013. *Mitigasi Bencana*. faujiahna.blogspot.co.id/2013
- Abu Ahmadi, H.(1990). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta
- Clive Gifford. (2009). *Banjir dan kekeringan* Alih Bahasa Kurniawan Nugroho. Solo: Tiga Serangkai,.
- Davis, K. (1967). *Human Relation at Work, The Dinamics of Organizational Behavior*. Mc Grow Hill Book Company.
- Dayakini, T. Dan Hadaninia. (2003). *Psikologi Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Graham Richards, (2010). *Psikologi; Serial konsep-konsep kunci*, diterjemahkan dari *Psychology* oleh Jamilla, Yogyakarta: Pustaka Baca
- Gunanto Surjono.(1996). *Pengkajian Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS
- Gunawan Sumodiningrat. (2000). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Holil Sulaiman. (1985). *Partisipasi Masyarakat*. Bandung: STKS.
- Hari Poerwanto. (2000). *Kebudayaan dan lingkungan-Dalam perspektif Antropologi*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J., & Tesoriero. F., (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (edisi 3). Judul Asli: *Community Development: Community-Base Alternatives in the Age of Globalization*, Pearson Education Australia, Unit 4, level 3, 14 Aquatic Drive Friends Forest NSW, 2006 (edidi 3).
- Iskandar, J. (1993). *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.
- Ikawati dan Chatarina R. (2009). *Kepedulian Masyarakat terhadap Kepuasan 'Difabel' Korban Gempa dalam Memperoleh Bantuan Aksesibilitas*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Komir Bastaman. (2000). *Pemberdayaan*, Bandung: BDPTS, Makalah Tidak Diterbitkan.
- Moelyarto Tjokrowinoto. (1974). *Beberapa Teknik di dalam Hubungan Kerja*, Bulletin BPA, Yogyakarta:UGM,
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarsa.
- Purwanto. (2007). *Awat Banjir*, Jakarta: Grafiti,
- Teti Ati Padmi Dkk. (2013). *Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.
- W. Nick Carter, (1991), *Managemen Penanggulangan Bencana*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Data CIP,
- _____.(2014). *Lampung dalam Angka*, Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan Badan Pusat Statistik (2007). *Pemetaan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Rawan Bencana Alam*.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), (2006). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Santoso S. Hamijaya. (1974). *Beberapa Catatan tentang Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Pendidikan.
- Sri Dewiyanti. (2004). *Hubungan antara Kemampuan Berempati dengan Perilaku Prosocial*. Yogyakarta: Uniersitas Islam Indonesia.
- Sunit Agus Tri Cahyono. (2011), *Kajian Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Banjir Bandang di Wasior*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Kompas com. 11 Desember 2014 *Tiap Menit, Indonesia Kehilangan Hutan SeluasTiga Kali Lapangan Bola*. Sains.kompas.com/read/2014/12/11
- Faturochman. *Dampak Psikologis Bencana Alam* <https://www.google.co.id>, diakses 11 Desember 2014

